

## PERAN MEDIA MASSA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Marcelinus Muklis CN<sup>1</sup>, Mangihut Siregar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Staf Ahli Fraksi: Hanura, Nasdem, Perindo Kabupaten Kutai Barat

<sup>2</sup>Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>bumidakubar.mm@gmail.com

Corresponding author e-mail: <sup>2</sup>mangihut@uwks.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juisspol.v4i2.4159>

Received: 20 Desember 2024 | Revised: 20 Desember 2024 | Accepted: 20 Desember 2024

### Abstrak

Peran media massa berfungsi sebagai saluran informasi yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat, serta berperan dalam membentuk opini publik. Di era digital, kecepatan dan aksesibilitas informasi menjadikan media sebagai alat yang kuat dalam memengaruhi kebijakan pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi peran media massa dalam pengambilan keputusan publik. Data dikumpulkan melalui analisis konten berita guna memberikan wawasan mendalam tentang interaksi antara media dan kebijakan publik. Teori agenda-setting dan teori framing, yang menjelaskan bagaimana media dapat memengaruhi isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Media massa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran media massa dalam mempengaruhi kebijakan publik di berbagai sektor. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi media dalam menjalankan fungsinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media massa memiliki peran signifikan dalam mengawasi tindakan pemerintah dan memberikan informasi yang mendidik kepada masyarakat. Namun, tantangan seperti tekanan politik dan kepentingan ekonomi sering kali menghambat objektivitas pemberitaan. Dengan menerapkan prinsip pemberitaan yang adil dan transparan, media dapat berkontribusi pada terciptanya kebijakan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dari penelitian ini ditegaskan bahwa media massa harus menjalankan perannya secara profesional dan bertanggung jawab untuk mengakomodasi kepentingan publik.

**Kata kunci:** Agenda Setting, Kebijakan Publik, Media Massa

### Abstract

The role of mass media serves as an information channel that connects the government and society, and plays a role in shaping public opinion. In the digital era, the speed and accessibility of information makes the media a powerful tool in influencing government policies. The method used in this research is descriptive qualitative, which aims to explore the role of mass media in public decision-making. Data was collected through news content analysis to provide in-depth insight into the interaction between the media and public policy. Agenda-setting theory and framing theory, which explain how the media can influence issues that are considered important by the public. The mass media not only conveys information, but also shapes the way the public perceives certain issues. The purpose of this research is to identify and analyse the role of mass media in influencing public policy in various sectors. This research also aims to explore the challenges faced by the media in carrying out its functions. The results of this study show that the mass media has a significant role in overseeing government actions and providing educational information to the public. However, challenges such as political pressure and economic interests often hamper the objectivity of reporting. By applying the principles of fair and transparent reporting, the media can contribute to the creation of better policies that are responsive to

the needs of society. Therefore, this study emphasises that the mass media must perform its role professionally and responsibly to accommodate the public interest.

**Keywords:** Agenda Setting, Public Policy, Mass Media.

## PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada peran media massa dalam kebijakan publik, yang semakin penting dalam konteks demokrasi modern. Media massa berfungsi sebagai saluran informasi yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat, serta berperan dalam membentuk opini publik. Dalam era digital, media massa memiliki kemampuan untuk memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap isu-isu tertentu, sehingga menjadikannya sebagai agen perubahan sosial yang signifikan. Kecepatan dan aksesibilitas informasi menjadikan media sebagai alat yang kuat dalam memengaruhi kebijakan pemerintah. Sebagaimana diungkapkan oleh (Alaslan, 2021), masyarakat kini hidup dalam "jaringan informasi" di mana media massa berperan sebagai penghubung antara berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya platform digital, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam diskusi publik, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai pembentuk agenda publik. Teori agenda-setting yang dikemukakan oleh McCombs dan Shaw (1972) menjelaskan bagaimana media dapat menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Dengan menyoroti isu-isu tertentu, media dapat memengaruhi prioritas kebijakan pemerintah dan mendorong perubahan sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran media dalam kebijakan publik menjadi sangat relevan. Dalam konteks ini, media massa juga berfungsi sebagai platform bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh Habermas (1989) dalam teori ruang

publiknya, media dapat menciptakan ruang bagi diskusi dan deliberasi yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, media massa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi dalam kebijakan publik.

Masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana media massa dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam memengaruhi kebijakan publik. Media massa memiliki potensi besar untuk membentuk opini dan menyampaikan informasi yang relevan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, media sering kali terjebak dalam dinamika politik dan ekonomi yang dapat memengaruhi objektivitas pemberitaan. Sebagai contoh, kepentingan pemilik media atau sponsor iklan dapat mengarahkan fokus pemberitaan pada isu-isu tertentu, sementara isu-isu lain yang lebih penting bagi masyarakat mungkin terabaikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana media dapat berfungsi sebagai watchdog yang independen dan kritis terhadap pemerintah (Hayat et al., 2021).

Tantangan lain yang dihadapi media adalah tekanan politik yang dapat membatasi kebebasan pers. Dalam banyak kasus, pemerintah atau kelompok politik tertentu berusaha untuk mengontrol narasi yang disampaikan oleh media, baik melalui ancaman, intimidasi, maupun regulasi yang ketat. Situasi ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi jurnalis untuk melaporkan fakta secara objektif dan berimbang. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan media lebih memilih untuk menghindari isu-isu sensitif, yang pada gilirannya mengurangi peran mereka dalam

mempengaruhi kebijakan publik secara positif.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori agenda-setting dan teori framing. Teori agenda-setting menjelaskan bagaimana media dapat memengaruhi isu-isu yang dianggap penting oleh publik, sementara teori framing menunjukkan bagaimana media membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu-isu tertentu (Aldilal et al., 2020). Kedua teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami interaksi antara media dan kebijakan publik.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis konten berita yang dipublikasikan oleh berbagai media massa. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola pemberitaan, tema-tema yang sering diangkat, serta bagaimana isu-isu tertentu dipresentasikan kepada publik (Anggara et al., 2020). Dengan memahami cara media menyampaikan informasi, peneliti dapat mengevaluasi apakah pemberitaan tersebut mencerminkan keberagaman perspektif dan kepentingan masyarakat. Selain itu, analisis konten juga membantu dalam mengidentifikasi potensi bias yang mungkin ada dalam pemberitaan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran media dalam membentuk opini publik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengeksplorasi peran media massa dalam kebijakan publik. Metode ini dipilih karena mampu menggali informasi secara mendalam tentang bagaimana media massa memengaruhi persepsi publik dan keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Menurut Creswell (2012), penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya mengenai fenomena yang diteliti dengan menggunakan pendekatan yang holistic (Latifah & Najicha, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa memiliki peran signifikan dalam mengawasi tindakan pemerintah dan memberikan informasi yang mendidik kepada masyarakat. Media berfungsi sebagai platform bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka, sehingga menciptakan ruang bagi dialog dan deliberasi yang konstruktif.

Namun, tantangan yang dihadapi, seperti pengaruh politik dan kepentingan ekonomi, dapat mengurangi efektivitas media dalam menjalankan fungsinya sebagai watchdog dan penyampai informasi yang akurat. Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam pemberitaan yang objektif dan berimbang. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran media dalam pengambilan keputusan publik, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori komunikasi massa, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas pemberitaan dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik.

## Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari analisis konten berita yang dipublikasikan oleh beberapa media massa terkemuka di Indonesia, baik media cetak maupun daring. Pemilihan media dilakukan secara purposif, yaitu memilih media yang memiliki audiens luas dan memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat. Beberapa media yang dipilih antara lain *Kompas*, *Tempo*, *Detik*, dan *Jakarta Post*. Semua artikel yang dipilih dalam analisis ini dipublikasikan

dalam kurun waktu 2019 hingga 2023 untuk mencakup peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik analisis konten. Sebagaimana dijelaskan oleh Hartati et al. (2019), analisis konten digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana isu-isu tertentu dibingkai oleh media massa dan bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. Data yang dikumpulkan berupa artikel berita yang relevan dengan topik kebijakan publik, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola pemberitaan, dan cara media membingkai isu-isu tertentu. Seluruh artikel yang dianalisis dipilih berdasarkan relevansi dengan topik kebijakan publik dan kualitas pemberitaan yang sesuai dengan standar jurnalistik.

### **Prosedur Analisis Data**

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori agenda-setting dan framing. Agenda-setting digunakan untuk melihat bagaimana media massa menyoroti isu-isu tertentu dan bagaimana media membentuk agenda publik. Teori framing, di sisi lain, digunakan untuk menganalisis bagaimana media membingkai isu tertentu, termasuk perspektif yang ditonjolkan dalam pemberitaan tersebut

### **Pengaruh Media dalam Menentukan Agenda Kebijakan**

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah kemampuan media massa untuk menentukan agenda publik, sebuah konsep yang dijelaskan dalam teori agenda-setting oleh McCombs dan Shaw (1972). Dalam teori ini, media massa memiliki kekuatan untuk memilih dan

### **Prosedur Pengumpulan Data**

(Shabira, 2021). Setiap artikel berita dianalisis untuk mengidentifikasi pesan utama yang disampaikan oleh media, serta cara penyajian informasi yang berpotensi mempengaruhi persepsi dan keputusan publik. Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan dengan mengacu pada literatur terkait untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika antara media massa dan kebijakan public.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis menunjukkan bahwa media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi kebijakan publik. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai agen sosial yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Penelitian ini menemukan adanya pola pemberitaan yang konsisten terkait isu-isu kebijakan yang mendapat perhatian besar di masyarakat, seperti kebijakan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Secara keseluruhan, media massa memengaruhi proses pembentukan kebijakan dengan cara yang kompleks dan beragam.

memprioritaskan isu tertentu, yang kemudian menjadi topik utama dalam diskursus publik. Dengan demikian, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengatur perhatian masyarakat terhadap isu-isu yang dianggap penting. Misalnya, dalam konteks kebijakan pendidikan, media sering kali menyoroti masalah terkait anggaran pendidikan yang

tidak memadai, sehingga isu ini mendapatkan perhatian publik yang luas.

Perhatian yang diberikan oleh media terhadap isu-isu tertentu mendorong tersebut. Tekanan publik yang tercipta seringkali membuat pemerintah terpaksa menyesuaikan kebijakan untuk lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, media berperan sebagai penghubung antara suara masyarakat dan pengambil keputusan, sehingga dapat menciptakan perubahan yang diinginkan. Contoh nyata dapat dilihat dalam pemberitaan tentang kebijakan pajak, di mana media massa sering kali membingkai isu tersebut dengan perspektif yang mempengaruhi persepsi publik.

Pembingkaiannya ini, sebagaimana dijelaskan oleh Entman (1993) dalam teori framing, tidak hanya memprioritaskan isu tersebut, tetapi juga mengarahkan bagaimana isu itu dipahami oleh publik. Media dapat memengaruhi apakah suatu kebijakan dianggap menguntungkan atau justru merugikan masyarakat. Misalnya, jika media membingkai kebijakan pajak sebagai langkah positif untuk meningkatkan layanan publik, masyarakat cenderung mendukung kebijakan tersebut. Sebaliknya, jika media menyoroti dampak negatif dari kebijakan tersebut, seperti potensi peningkatan beban finansial bagi masyarakat, maka dukungan publik bisa berkurang.

Media juga berperan dalam menciptakan narasi yang dapat memengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan umum. Dengan menyoroti isu-isu tertentu dan membingkainya dengan cara yang spesifik, media dapat memengaruhi keputusan pemilih dan hasil pemilu. Dalam konteks ini, media memiliki tanggung jawab besar untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang, agar masyarakat dapat membuat

masyarakat, politisi, dan pembuat kebijakan untuk merespons dan memperhatikan masalah

keputusan yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi jurnalis untuk menyadari dampak dari pilihan kata dan sudut pandang yang mereka gunakan dalam pemberitaan.

Penelitian ini menekankan perlunya media untuk beroperasi dengan integritas dan objektivitas, serta untuk memberikan informasi yang seimbang dan akurat. Dengan demikian, media tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sebagai pendorong untuk menciptakan dialog yang konstruktif dan transparan. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, peran media dalam menentukan agenda publik dan membingkai isu-isu penting menjadi semakin krusial untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi dalam kebijakan yang diambil.

### **Tantangan dalam Pengaruh Media Terhadap Kebijakan Publik**

Meskipun media memiliki peran besar dalam mempengaruhi kebijakan, mereka menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah pengaruh politik dan ekonomi yang dapat memengaruhi objektivitas pemberitaan (Manasikana & Noviani, 2021). Media yang dimiliki oleh konglomerat besar atau pihak-pihak dengan kepentingan politik tertentu sering terlibat dalam framing isu yang mendukung agenda politik mereka. Dalam konteks ini, pemberitaan mengenai kebijakan ekonomi atau politik terkadang dipengaruhi oleh kepentingan pemilik media yang mungkin

terhubung dengan pihak yang berkuasa, sehingga mengaburkan kebenaran yang seharusnya disampaikan kepada publik.

Sebagai contoh, dalam laporan mengenai kebijakan pajak atau subsidi pemerintah, media dapat memilih untuk menyoroti aspek-aspek yang menguntungkan bagi pemilikinya, sementara mengabaikan dampak negatif yang mungkin dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menciptakan narasi yang tidak seimbang dan dapat menyesatkan publik dalam memahami isu-isu penting. Selain itu, media massa juga cenderung menghindari pemberitaan yang dapat merugikan sponsor mereka, seperti perusahaan besar yang membayar iklan. Ketergantungan pada pendanaan iklan ini berpotensi mereduksi peran media sebagai pengawas independen yang objektif terhadap kebijakan publik, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disajikan.

Tekanan politik yang datang dari pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu juga dapat menghambat kebebasan pers. Sejumlah jurnalis dan media di Indonesia telah mengalami intimidasi atau ancaman hukum ketika mereka melaporkan isu-isu sensitif terkait kebijakan pemerintah (Intyaswati, 2021). Situasi ini menciptakan ketidakpastian dalam praktik jurnalisme yang independen dan dapat mengurangi efektivitas media dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas kebijakan yang objektif. Ketidakberdayaan ini tidak hanya berdampak pada jurnalis, tetapi juga pada masyarakat yang berhak mendapatkan informasi yang akurat dan tidak terdistorsi.

Kondisi ini memperburuk tantangan bagi media untuk menyampaikan informasi yang tidak terdistorsi kepada publik, sehingga mengurangi kualitas partisipasi publik dalam

diskusi kebijakan. Ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas dan objektif, mereka akan kesulitan untuk memahami isu-isu yang memengaruhi kehidupan mereka. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi berkurang, dan suara mereka tidak terdengar dalam diskursus publik. Hal ini dapat mengarah pada kebijakan yang tidak mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tantangan ini juga menciptakan risiko bagi keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Media yang tidak independen dan terpengaruh oleh kepentingan politik atau ekonomi dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dan memperlemah legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, pemilik media, dan masyarakat, untuk mendukung kebebasan pers dan memastikan bahwa media dapat beroperasi tanpa tekanan atau intervensi.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung jurnalisme yang independen dan bertanggung jawab. Pendidikan media bagi masyarakat juga sangat penting agar mereka dapat lebih kritis dalam mengonsumsi berita dan memahami konteks di balik pemberitaan. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya informasi yang akurat dan berimbang, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam diskusi kebijakan dan mendorong media untuk menjalankan perannya dengan lebih baik. Sinergi antara media, pemerintah, dan masyarakat akan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem

informasi yang sehat dan mendukung demokrasi yang lebih kuat.

### **Peran Media dalam Meningkatkan Partisipasi Publik**

Di sisi lain, media massa berperan penting dalam meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Dengan adanya platform digital dan media sosial, masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap kebijakan publik (Prawira et al., 2022). Media menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berbicara dan mengajukan opini mereka mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Ini menciptakan sebuah proses deliberasi yang mempertemukan berbagai pandangan dan memungkinkan terjadinya perubahan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik (Habermas, 1989). Proses deliberasi ini memperlihatkan bagaimana media dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, yang memperkuat demokrasi dengan mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Dalam hal ini, media sosial telah menjadi saluran baru yang sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap kebijakan pemerintah. Melalui media sosial, masyarakat tidak hanya dapat mengakses informasi, tetapi juga dapat berinteraksi langsung dengan pejabat pemerintah dan media massa untuk mengungkapkan pendapat mereka. Hal ini menciptakan dialog yang lebih terbuka dan memungkinkan masyarakat untuk berperan

aktif dalam mempengaruhi keputusan kebijakan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, media massa memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas kebijakan publik. Namun, untuk dapat menjalankan peran ini secara optimal, media perlu menjaga independensinya dari pengaruh politik dan ekonomi yang dapat merusak objektivitas pemberitaan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis terhadap pemberitaan media dan selalu mencari berbagai sumber informasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang isu-isu kebijakan publik yang sedang berkembang.

### **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa media massa memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi kebijakan publik. Namun, tantangan-tantangan seperti tekanan politik dan kepentingan ekonomi dapat mengurangi objektivitas pemberitaan, yang memengaruhi efektivitas media dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, media perlu menjaga profesionalisme dan independensinya dalam pemberitaan, serta menghindari bias yang dapat merugikan publik. Pemerintah juga perlu menciptakan kebijakan yang mendukung kebebasan pers, agar media dapat berfungsi sebagai pengawas yang kritis dan objektif dalam proses pengambilan keputusan kebijakan public.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alaslan, A. (2021). Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar. In *CV. Pena Persada* (Vol. 53, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>
- Aldilal, A., Sanjaya, A. A., Akbar, N., & Febriansyah, M. R. (2020). Pemberitaan dan Opini Publik tentang Kedatangan Tenaga Kerja China Pada Masa Pandemi COVID-19 di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 280. <https://doi.org/10.31315/jik.v18i3.3789>
- Anggara, S., Afiyah, S., Farida, A. S., & Muslim, J. (2020). Inovasi Kebijakan Publik Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Di Jawa Barat. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 130–139.
- Hayat, M. A., Subroto, P., Kurniawan, M. I., & Jauhari, M. R. (2021). Kontribusi Komunikasi Massa Instansi Pemerintah Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kapuas. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(12), 6240–6255. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i12.5050>
- Intyaswati, D. (2021). Peran Media Massa Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 25(2), 140–149. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v25i2.142>
- Latifah, K. N., & Najicha, F. U. (2022). Implikasi media sosial terhadap formulasi kebijakan publik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 494–501.
- Manasikana, R. A., & Noviani, R. (2021). Peran Media Massa dan Teknologi dalam Transformasi Keintiman di Indonesia. *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 7–19. <https://doi.org/10.37715/calathu.v3i1.1895>
- Prawira, M. R., Ardiputra, S., & Hidayat, R. (2022). Analisis Dampak Wacana Publik Di Media Massa Dan Media Sosial Terhadap Kebijakan Publik (Sulawesi Barat). *MANDAR: Social Science Journal*, 1(1), 74–85. <https://doi.org/10.31605/mssj.v1i1.1776>
- Shabira, F. (2021). Agenda Setting: Eksplorasi Pada Komunikasi Massa. *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 1(1), 26–37. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v1i1.5>